

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia, 2022, *Buku Pedoman Kurator Dan Pengurus Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia*, Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta
- Khairandi, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Nating, Imran, 2019, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Rajagukguk, Erman, 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaja Man. S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung

Sidharta, Bernard Arief, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, PT Mandar Maju, Bandung.

Sinaga, Syamsudin, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, Penerbit UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta.

Tumbuan, Fred BG dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung

Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H., 2021, *Cross Border Insolvency Kerjasama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan, Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (*Staatsblad* 1847- 23)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245)

### Jurnal

Arif, Ahmad Nur Fauzy Al, 2017, Analisis Terhadap Pembatalan Penetapan Imbalan Jasa Kurator Dalam Kepailitan PT Telkomsel Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48K /PDT. SUS. PAILIT/2013, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1 - 136

Hasan Basri, 2014, Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda, *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, Nomor 10, 831-838. David Publishing, Banda Aceh, DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003, hlm. 831 – 838

International Council For Commercial Arbitration, 2018, Report Of The ICCA - Queen Mary Task Force Report on Third Party Funding In International Arbitration, University of London, hlm. 12

Kadarisman Abimanyu, 2019, Disclosure of Third-Party Funding Arrangements and The Existence of Third-Party Funders In International Investment Arbitration, *Journal of International Law*, Vol. 17 Nomor 1, Ministry of Trade, Republic of Indonesia, Jakarta, hlm. 91 - 112

Hidayah Lili Naili., Muskibah, 2020, Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standart Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 177 – 179.

Nababan Siti Aminah, “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Model Problem Based Learning”, *Jurnal Genta Mulia*, Vol. XI, Nomor 1, 2020, Penerbit Genta Mulia, Banda Aceh, hlm. 6 - 12

Permana, Putra Heru, 2011, “Pembagian Imbalan Jasa Bagi Kurator Di Pengadilan Niaga Jakarta” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 1 - 64

Temenggung Carissa T.A., Yetty Komalasari Dewi, 2020, Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 379 – 399

Wijayanta Tata, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam

Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 216 - 226

Wijayanta Tata, 2014, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1 - 13

### **Kamus**

Law, Jonathan dan Elizabeth A. Martin, 2014, *Oxford Dictionary of Law Edition 7*, London Oxford University Press, hlm. 512.

Campbell Black, Henry, M.A., 1979, *Black's Law Dictionary :Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Fifth Edition ST*, Paul Minn, West Publishing Co.

### **Internet**

AKPI, “Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia” <http://www.akpi.or.id/id/akpi-66/kode-etik-akpi-asosiasi-kurator-%26-pengurus-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022

Burford Capital's Quarterly Summer 2017 Overview, <http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2017/07/Burford-Quarterly-Summer-2017> diakses pada tanggal 24 November 2022

CI Arb Costs of International Arbitration Survey 2011, 13 (survey of 254 international commercial arbitrati conducted between 1991 and 2010 finding that claimants on average spend GBP 1,580,000 in total, wh respondents spend GBP 1,413,000); UNCTAD, *Investor-State Disputes*, 16-18 ('[contrary to the expectatios it turns out that costs involved in investor-state arbitration have skyrocketed in recent years costs for conducting arbitration procedures are extremely high') (emphasis original); OECD, *Government Perspectiv on Investor-State Dispute Settlement*, 8 ('legal and arbitration costs for the parties in recent ISDS [investor-stal dispute settlement] cases have averaged over USD 8 million)), diakses pada tanggal 24 November 2022

G.P. Aji Wijaya, “Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)”, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang--i> diakses pada tanggal 2 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/narasumber>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Kontan Nasional, Vendy Yhulia Susanto. “Sepanjang Tahun 2021 jumlah perkara PKPU meningkat”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat>, diakses tanggal 5 Juli 2022

Kreatif Media, [www.kreatifmedia.id](http://www.kreatifmedia.id), diakses pada tanggal 6 Januari 2023

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ([pn-jakartapusat.go.id](http://pn-jakartapusat.go.id)), diakses tanggal 21 Desember 2022

### **Wawancara**

Prasetyo, Riyo Hanggoro, 2023, Pembiayaan dari pihak ketiga kepada Pengurus atau Kurator dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atau Kepailitan, *Wawancara*, 12 Januari.

Purba James Jamaslin, 2022, Pembiayaan dari pihak ketiga kepada Pengurus atau Kurator dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atau Kepailitan, *Wawancara*, 31 Desember.